

**PENGARUH PEMBERLAKUAN PEMBATAAN SOSIAL
BERSKALA BESAR (PSBB) TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KOTA BANDAR LAMPUNG SAAT PANDEMI
COVID-19 DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh:

SULIYAH

NPM: 1751010137

Jurusan: Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**PENGARUH PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR (PSBB) TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KOTA BANDAR LAMPUNG SAAT PANDEMI
COVID-19 DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh:

SULIYAH

NPM: 1751010137

Jurusan: Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si

Pembimbing II : Okta Supriyaningsih, M.E.Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Berdasarkan Judul Skripsi ini yaitu “**Pengaruh Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung saat Pandemi Covid-19 dalam Prespektif Ekonomi Islam**”. Maka perlu ditegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul, agar terhidar dari kesalahpahaman dalam memahami maksud skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:.

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.² Istilah pengaruh disebut juga dengan akibat asosiatif, yaitu suatu penelitian yang mencari pertautan nilai antara suatu variable dengan variable lainnya. Adapaun variable yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau biasa disebut variable independent. Sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah pertumbuhan ekonomi merupakan atau biasa disebut variable deperdent.

2. Pemberlakuan

Pemberlakuan berasal dari kata laku yang artinya perbuatan, gerak-gerik, tindakan, cara menjalankan atau berbuat.³ Maksud arti dari kata pemberlakuan dalam skripsi ini adalah cara menjalankan suatu aturan pemerintah.

3. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan sedemikian rupa mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).⁴

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.⁵

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), *Pengaruh*, di akses dari <https://kbbi.web.id/Pengaruh>, tanggal 16 Januari 2021.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), *Laku*, di akses dari <https://kbbi.web.id/laku> tanggal 16 Januari 2021.

⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, *Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, 4.

⁵ Nurrohman, Ponsen Sindu Prawito, *Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Indonesia: Studi Kasus Perkembangan Keuangan Komersial Syariah Dan Keuangan Sosial Syariah*, 2020, 4.

5. Pandemi

Pandemi dimaknai sebagai wabah yang menjangkit bersamaan di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas.⁶ Atau bisa disebut juga dengan penyakit yang menyebar bersamaan keberbagai negara di dunia.

6. Covid-19

Corona virus 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut corona virus 2 (SARS-CoV-2).⁷

7. Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-qur'an dan Sunnah.⁸

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas, maka yang dimaksud dari skripsi ini adalah memberikan gambaran dan mengukur pengaruh pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terhadap pertumbuhan ekonomi saat pandemi covid-19 dalam prespektif ekonomi Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu.

Tabel 1.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2016-2020, (Persen)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Persen)
2016	5,03%
2017	5,07%
2018	5,17%
2019	5,02%
2020	-2,07%

Sumber : BPS Indonesia 2021

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), *Pandemi*, di akses dari <https://kbbi.web.id/pandemi>, tanggal 16 Januari 2021.

⁷ Eman Supriatna, *Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7 No. 6, 2020, 3.

⁸ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 19.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di awal tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena munculnya virus yang bermula dari kota Wuhan di Tiongkok, yaitu virus corona (SARS CoV 2).⁹ Virus corona (SARS CoV 2) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut corona virus 2 (SARS-CoV-2).¹⁰ Virus ini menyebar ke berbagai negara di dunia salah satunya Negara Indonesia. Pada 11 Maret 2020, WHO (*World Health Organization*) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi.¹¹ Covid-19 sangat berpengaruh bagi Indonesia, terutama terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sejak kasus pertama Covid-19 terungkap pada 1 Maret 2020 dan begitu sangat cepat menyebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia, sehingga banyak kasus yang terjadi. Sejak saat itu, beragam kebijakan pemerintah ditempuh untuk membendung penyebaran virus. Kebijakan pemerintah yang ditempuh dalam memperlambat penyebaran virus ini salah satunya melakukan gerakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) merupakan sebuah penyelenggaraan pembatasan kegiatan-kegiatan di tempat umum dan mengkarantinakan diri sendiri di dalam rumah. Penerapan aturan PSBB ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Pemerintah Indonesia tidak menerapkan kebijakan *lockdown* hanya menerapkan *social distancing* berskala luas yang dikenal dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dengan penerapan PSBB ini, kita tidak hanya mendapatkan harapan bebasnya warga dari Covid-19 tetapi juga kualitas lingkungan yang lebih baik.¹²

Peraturan PSBB sudah tercatat di dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020. Sejak peraturan tersebut disahkan oleh Presiden Joko Widodo, diketahui ada 2 provinsi dan 16 kabupaten/kota yang mengajukan dan menerapkan PSBB. Provinsi dan kabupaten/kota yang telah disetujui untuk melakukan PSBB yaitu, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Pekanbaru, Kota Makassar, Kota Tegal, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang dan Kota Cimahi.¹³ Dengan pemberlakuan PSBB di 2 provinsi dan 16 kabupaten/kota mengakibatkan penurunan dalam pertumbuhan ekonomi disetiap provinsi dan kabupaten/kota tersebut. Salah satunya pertumbuhan ekonomi provinsi DKI Jakarta yang mana kita tahu kota ini dijadikan sebagai pusat kegiatan perekonomian.

⁹ Marleni, dkk, *Pengaruh PSBB Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kuala Tungkal Saat Covid-19*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2 Edisi 2, 2019, 26.

¹⁰ Marleni, dkk, Ibid, 1.

¹¹ Nancy Pembengo, "WHO Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi", dalam Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Gorontalo, 2020), <https://dinkes.gorontalo.gov.id/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi/>, diunduh tanggal 08 November 2020.

¹² Rindam Nasruddin, Islamul Haq, *Pembatasan Sosial Bersekala Besar dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Jurnal Sosial & Budaya Syar'i. Vol. 7 No. 7, 2020, 644.

¹³ PSBB, diakses dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/05534481/daftar-18-daerah-yang-terapkan-psbb-dari-jakarta-hingga-makassar?page=all>, tanggal 16 Januari 2021.

Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020
(Persen)

Tahun	Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)
2016	5,87%
2017	6,20%
2018	6,11%
2019	5,82%
2020	-2,37%

Sumber : BPS DKI Jakarta 2021

Berdasarkan tabel 1.2 Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan DKI Jakarta minus hingga 2,37% tahun 2020. Angka ini jauh lebih parah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama yakni mencapai -2,07% yang dijelaskan pada tabel 1.1. Penurunan ini diakibatkan adanya peraturan pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat atau PSBB di daerah tertentu termasuk DKI Jakarta.

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bandar Lampung Tahun 2016-
2020 (Persen)

Tahun	Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)
2016	6,43%
2017	6,28%
2018	6,20%
2019	6,21%
2020	-1,85%

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung 2021

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung di tahun 2020 berdasarkan tabel 1.3 mengalami penurunan -1,85%. hal ini tidak lain disebabkan karena dengan adanya covid-19 yang mengakibatkan beberapa pemerintah daerah mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB). Oleh karena itu, peneliti ingin mengukur atau mengukur seberapa berpengaruhnya PSBB ini terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung saat pandemi covid-19.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, mengenai PSBB dan pertumbuhan ekonomi di 2 provinsi dan 16 kabupaten/kota yang memberlakukan PSBB. Tercatat salah satunya mengalami penurunan hal itu menandakan bahwa PSBB yang dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota tersebut mempengaruhi pertumbuhannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti topik ini yang nantinya akan dijadikan tugas akhir pendidikan penulis yaitu meneliti daerah/kota yang tidak memberlakukan PSBB apakah pertumbuhannya mengalami penurunan atau tidak?. Dalam hal ini daerah yang akan diteliti oleh peneliti adalah pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 dimana bersamaan dengan diberlakukannya PSBB di 2 provinsi dan 16 kabupaten/kota yang disetujui oleh pemerintah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penulis memberikan rumusan masalah sebagai dasar penelitian yaitu, sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung saat pandemi covid-19?
2. Apakah pengaruh pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung saat pandemi covid-19 dalam prespektif ekonomi Islam?

E. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu, sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung saat pandemi covid-19
2. Mengetahui pengaruh pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung saat pandemi covid-19 dalam prespektif ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Pertama bagi akademisi, memberikan sumbangsih hasil pemikiran mengenai pengaruh pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terhadap pertumbuhan ekonomi saat pandemi covid-19 di Kota Bandar Lampung dalam prespektif ekonomi Islam. Menambah literasi mengenai hal tersebut bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Raden Intan Lampung, khususnya bagi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah. Kedua bagi penulis, sebagai pengetahuan, menambah wawasan dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang berwenang dalam mengambil kebijakan, khususnya pemerintah daerah yang menjadi objek penelitian.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Iin Marleni, Sri Kasnelly, Ahmad Luthfi, dengan judul Pengaruh PSBB Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kuala Tungkal saat Covid-19 ada tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi bernilai positif (+), maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa PSBB (X) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).¹⁴
2. Mewa Ariani, Adi Setiyanto, Tri B. Purwantini, dengan judul Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Distribusi dan Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan PSBB berdampak negatif terhadap kelancaran distribusi pangan, terutama terjadi diawal pelaksanaan peraturan PSBB yang membuat kepanikan sebagian masyarakat di wilayah konsumen seperti Jabodetabek dengan melakukan *panic buying*. Kebijakan PSBB juga mengakibatkan penurunan permintaan pangan dan perubahan pola konsumsi pangan masyarakat baik kuantitas, kualitas maupun pola pembelian pangan sebagai akibat penurunan pendapatan dan daya beli.¹⁵
3. Rindam Nasruddin, Islamul Haq, dengan judul Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya peraturan PSBB adalah suatu langkah kecil namun berarti besar, tetapi disisi lain juga memberikan dampak terhadap beberapa masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah karena sangat berpengaruh bagi ruang gerak mereka untuk mencari nafkah. Hal ini menyebabkan keresahan bagi para masyarakat yang pekerjaannya berada

¹⁴ Marleni, dkk, *Pengaruh PSBB Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kuala Tungkal Saat Covid-19*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2 Edisi 2, 2019, 24-42.

¹⁵ Mewa Ariani, Adi Setiyanto, Tri B. Purwantini, *Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Distribusi dan Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga*, 2020, 449.

di luar, yang mengharuskan mereka untuk membatasi kegiatan di luar rumah, dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya.¹⁶

4. Achmad Faiz Mufidi, R. Nunung Nurwati, dengan judul Pengaruh Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Tingkat Intensitas Mobilitas Penduduk dan Mudik Lebaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua sumber pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berpengaruh terhadap tingkat intensitas mobilitas penduduk dan mudik lebaran.¹⁷

H. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pendahuluan dalam skripsi ini menjelaskan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan yang akan dijelaskan secara singkat.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang menyangkut variabel-variabel yang diteliti dan hipotesis penelitian perkiraan hasil serta menjawab rumusan masalah dari penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, uji validitas dan reliabilitas data, instrumen penelitian, dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung dimana kota ini tidak memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) saat pandemi covid-19.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang sesuai dengan hasil penelitian.

¹⁶ Rindam Nasruddin, Islamul Haq, *Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 7 No. 7, 2020, 639-647.

¹⁷ Achmad Faiz Mufidi, R. Nunung Nurwati, *Pengaruh Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Tingkat Intensitas Mobilitas Penduduk Dan Mudik Lebaran*, Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai *pandemic* dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan karantina kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan.

Penyelenggaraan kekarantina kesehatan merupakan tanggungjawab bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dapat segera diatasi. Keekarantina kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantina kesehatan. salah satu tindakan kekarantina kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan COVID-19 dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dalam penyelenggaraan kekarantina kesehatan di wilayah, Indonesia telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas, yang didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kebijakan tersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial

Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) mengatur bahwa Menteri Kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar berdasarkan usul gubernur/bupati/walikota atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh Menteri, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

1. Kriteria Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

- a. Prasyarat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah terpenuhinya kriteria situasi penyakit berupa peningkatan signifikan jumlah kasus dan/atau kematian akibat penyakit, penyebaran kasus yang cepat ke beberapa wilayah, dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Karenanya, penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Menteri didasarkan pada terjadinya peningkatan jumlah kasus dan/atau kematian secara bermakna dalam kurun waktu tertentu, penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu, dan ada bukti terjadi transmisi lokal.
- b. Yang dimaksud dengan kasus adalah pasien dalam pengawasan dan kasus konfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan *Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR).
- c. Peningkatan jumlah kasus dan/atau kematian secara bermakna diketahui dari pengamatan kurva epidemiologi kasus dan/atau kematian. Adanya kecenderungan peningkatan kasus dan/atau kematian dalam kurun waktu hari atau minggu menjadi bukti peningkatan bermakna.
- d. Kecepatan penyebaran penyakit di suatu area/wilayah dilakukan dengan melakukan pengamatan area/wilayah penyebaran penyakit secara harian dan mingguan. Penambahan area/wilayah penyebaran penyakit dalam kurun waktu hari atau minggu menjadi bukti cepatnya penyebaran penyakit.
- e. Terjadinya transmisi lokal di suatu area/wilayah menunjukkan bahwa virus penyebab penyakit telah bersirkulasi di area/wilayah tersebut dan bukan merupakan kasus dari daerah lain.

2. Tata Cara Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pembatasan Sosial Berskala Besar di suatu wilayah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota, atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Mekanisme permohonan tersebut dilakukan sebagai berikut:

- a. Gubernur/bupati/walikota menyampaikan usulan kepada Menteri disertai dengan data gambaran epidemiologis dan aspek lain seperti ketersediaan logistik dan kebutuhan dasar lain, ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan perbekalan kesehatan termasuk obat dan alat kesehatan. Data yang disampaikan kepada Menteri juga termasuk gambaran kesiapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah.
- b. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam menyampaikan usulan kepada Menteri untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu, berdasarkan penilaian terhadap kriteria Pembatasan Sosial Berskala Besar.
- c. Permohonan oleh gubernur/bupati/walikota dapat disampaikan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- d. Permohonan dari gubernur untuk lingkup satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu di wilayah provinsi.
- e. Permohonan dari bupati/walikota untuk lingkup satu kabupaten/kota di wilayahnya.
- f. Dalam hal bupati/walikota akan mengajukan daerahnya ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, maka terlebih dahulu berkonsultasi kepada gubernur dan Surat permohonan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ditembuskan kepada gubernur.
- g. Dalam hal terdapat kesepakatan Pemerintah Daerah lintas provinsi untuk ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara bersama, maka pengajuan permohonan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri dilakukan melalui Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Untuk itu, kepada Pemerintah Daerah yang daerahnya akan ditetapkan secara bersama-sama harus berkoordinasi dengan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- h. Untuk kecepatan proses penetapan, permohonan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk file elektronik, yang ditujukan pada alamat email psbb.covid19@kemkes.go.id.
- i. Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Menteri dilakukan berdasarkan rekomendasi kajian dari tim yang dibentuk yang sudah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Kajian tersebut berupa kajian epidemiologis dan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan, dan keamanan. Untuk itu tim yang dibentuk terdiri dari unsur kementerian kesehatan, kementerian/lembaga lain yang terkait dan para ahli.

- j. Menteri menyampaikan keputusan atas usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk wilayah provinsi/kabupaten/kota tertentu dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan penetapan.
- k. Dalam hal permohonan penetapan belum disertai dengan data dukung, maka Pemerintah Daerah harus melengkapi data dukung paling lambat 2 (dua) hari sejak menerima pemberitahuan dan selanjutnya diajukan kembali kepada Menteri.
- l. Penetapan dilaksanakan dengan mempertimbangkan rekomendasi tim dan memperhatikan pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID19).
- m. Pertimbangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) paling lama disampaikan kepada Menteri dalam waktu 1 (satu) hari sejak diterimanya permohonan penetapan. Dalam hal waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, maka Menteri dapat menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Formulir permohonan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh gubernur/bupati/walikota, atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut.



Kop Surat Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Nomor : (tanggal, bulan, tahun)
 Hal : Permohonan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar
 Sifat : Segera

Yth. Menteri Kesehatan
 Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
 Jakarta 12950

Sehubungan Dengan penyebaran COVID-19 yang semakin luas di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, bersama ini kami mohon Menteri Kesehatan dapat melakukan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan data dan dokumen pendukung mengenai:

1. Peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
2. Peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
3. Penyebaran kasus menurut waktu;
4. Kejadian transmisi lokal; dan
5. Kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Menteri Kesehatan diucapkan terima kasih.

Gubernur/Walikota/Bupati

(Nama)

Tembusan:

1. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (COVID-19)
2. Menteri Dalam Negeri
3. Gubernur (jika permohonan oleh Bupati/Walikota)

**Logo/Kop Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)**

Nomor : (tanggal, bulan, tahun)
 Hal : Permohonan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar
 Sifat : Segera

Yth. Menteri Kesehatan
 Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
 Jakarta 12950

Sehubungan Dengan penyebaran COVID-19 yang semakin luas di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, bersama ini kami mohon Menteri Kesehatan dapat melakukan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan data dan dokumen pendukung mengenai:

1. Peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
2. Peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
3. Penyebaran kasus menurut waktu;
4. Kejadian transmisi lokal; dan
5. Kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Menteri Kesehatan diucapkan terima kasih.

Ketua Pelaksana Gugus Tugas
 Percepatan Penanganan *Corona virus
 Disease 2019 (COVID-19)*

(Nama)

Tembusan:
 Menteri Dalam Negeri

3. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan selama masa inkubasi terpanjang (14 hari). Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.

a. Peliburan Sekolah

Peliburan sekolah adalah penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan menggantinya dengan proses belajar mengajar di rumah dengan media yang paling efektif. Pembatasan kegiatan semua lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian, pembinaan, dan lembaga sejenisnya, dengan tetap dapat menjalankan proses pembelajaran melalui media yang paling efektif dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit. Pengecualian peliburan sekolah bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

b. Peliburan Tempat Kerja

Peliburan tempat kerja adalah pembatasan proses bekerja di tempat kerja dan menggantinya dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal, untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja. Pengecualian peliburan tempat kerja yaitu bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya sebagai berikut:

- 1) Kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan perusahaan publik tertentu seperti:
 - a) Kantor Pemerintah terkait aspek pertahanan keamanan:
 - (1) Instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI)
 - (2) Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
 - b) Bank Indonesia, lembaga keuangan, dan perbankan
 - c) Utilitas publik (termasuk pelabuhan, bandar udara, penyeberangan, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, listrik, air dan sanitasi)
 - d) Pembangkit listrik dan unit transmisi
 - e) Kantor pos
 - f) Pemadam kebakaran
 - g) Pusat informatika nasional
 - h) Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara
 - i) Bea Cukai di pelabuhan/ bandara/ perbatasan darat
 - j) Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan
 - k) Kantor pajak
 - l) Lembaga/badan yang bertanggung jawab untuk manajemen bencana dan peringatan dini

- m) Unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara kebun binatang, pembibitan, margasatwa, pemadam kebakaran di hutan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan.
 - n) Unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/ panti jompo/ panti sosial lainnya.
Kecuali untuk TNI/POLRI, kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.
- 2) Perusahaan komersial dan swasta:
- a) Toko-toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok serta barang penting, yang mencakup makanan (antara lain: beras, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, gula, minyak goreng, tepung terigu, buahbuahan dan sayuran, daging sapi, daging ayam, telur, ayam, ikan, susu dan produk susu, dan air minum dalam kemasan) termasuk warung makan/rumah makan/restoran, serta barang penting yang mencakup benih, bibit ternak, pupuk, pestisida, obat dan vaksin untuk ternak, pakan ternak, gas LPG, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan.
 - b) Bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian ATM dan vendor IT untuk operasi perbankan, *call center* perbankan dan operasi ATM.
 - c) Media cetak dan elektronik.
 - d) Telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel. IT dan Layanan yang diaktifkan dengan IT (untuk layanan esensial) sebisa mungkin diupayakan untuk bekerja dari rumah, kecuali untuk mobilitas penyelenggara telekomunikasi, vendor/supplier telekomunikasi/IT, dan penyelenggara infrastruktur data.
 - e) Pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis.
 - f) Pompa bensin, LPG, *outlet* ritel dan penyimpanan Minyak dan Gas Bumi.
 - g) Pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi.
 - h) Layanan pasar modal sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa Efek Jakarta.
 - i) Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang.
 - j) Layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (*cold storage*).
 - k) Layanan keamanan pribadi.

Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

3) Perusahaan industri dan kegiatan produksi:

- a) Unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat lainnya.
- b) Unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari Kementerian Perindustrian.
- c) Produksi minyak dan gas bumi, batubara dan mineral dan kegiatan yang terkait dengan operasi penambangan.
- d) Unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan.
- e) Kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura.
- f) Unit produksi barang ekspor.
- g) Unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha mikro kecil menengah.

Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

4) Perusahaan logistik dan transportasi

- a) Perusahaan angkutan darat untuk bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting, barang ekspor dan impor, logistik, distribusi, bahan baku dan bahan penolong untuk industri dan usaha mikro kecil menengah.
- b) Perusahaan pelayaran, penyeberangan, dan penerbangan untuk angkutan barang.
- c) Perusahaan jasa pengurusan transportasi dan penyelenggara pos.
- d) Perusahaan jasa pergudangan termasuk *cold chain*

Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

b. Pembatasan Kegiatan Keagamaan

- 1) Bentuk pembatasan kegiatan keagamaan adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang.
- 2) Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum.

- 3) Pengecualian kegiatan keagamaan sebagaimana angka (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.
 - 4) Pemakaman orang yang meninggal bukan karena COVID-19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari dua puluh orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan).
- c. Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum
- Bentuk pembatasan tempat atau fasilitas umum dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, kecuali:
- 1) Supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi.
 - 2) Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan. Rumah sakit dan semua instansi medis terkait, termasuk unit produksi dan distribusi, baik di sektor publik maupun swasta, seperti apotek, unit transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan peralatan medis, laboratorium, klinik, ambulans, dan laboratorium penelitian farmasi termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan akan tetap berfungsi. Transportasi untuk semua tenaga medis, perawat, staf medis, layanan dukungan rumah sakit lainnya tetap diizinkan untuk beroperasi.
 - 3) Hotel, tempat penginapan (*homestay*), pondokan dan motel, yang menampung wisatawan dan orang-orang yang terdampak akibat COVID-19, staf medis dan darurat, awak udara dan laut.
 - 4) Perusahaan yang digunakan/diperuntukkan untuk fasilitas karantina.
 - 5) Fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan.
 - 6) Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga.
- Pengecualian tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan.
- d. Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya
- Pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga termasuk semua perkumpulan atau pertemuan politik, olah raga, hiburan, akademik, dan budaya.
- e. Pembatasan Moda Transportasi
- 1) Transportasi yang mengangkut penumpang
Semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya (kendaraan umum/pribadi) tetap berjalan dengan pembatasan jumlah penumpang.

2) Transportasi yang mengangkut barang

Semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya tetap berjalan untuk barang penting dan esensial, antara lain:

- a) Angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi
- b) Angkutan barang untuk keperluan bahan pokok
- c) Angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang perlu distribusi ke pasar dan supermarket
- d) Angkutan untuk pengedaran uang
- e) Angkutan BBM/BBG
- f) Angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan assembling
- g) Angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor
- h) Angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya)
- i) Angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan assembling
- j) Angkutan kapal penyeberangan
- 3) Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban, dan layanan darurat tetap berjalan.
- 4) Operasi kereta api, bandar udara dan pelabuhan laut, termasuk bandar udara dan pelabuhan laut TNI/POLRI, untuk pergerakan kargo, bantuan dan evakuasi, dan organisasi operasional terkait tetap berjalan.

f. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan
 Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan dikecualikan pada kegiatan-kegiatan operasi militer/kepolisian baik sebagai unsur utama maupun sebagai unsur pendukung dengan cakupan sebagai berikut:

1) Kegiatan Operasi Militer:

- a) Kegiatan operasi militer perang dan kegiatan operasi militer selain perang.
- b) Kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI untuk mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID19, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota.
- c) Kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI dalam rangka menghadapi kondisi darurat negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Kegiatan operasi POLRI:

- a) Kegiatan operasi kepolisian terpusat maupun kewilayahan.

- b) Kegiatan kepolisian yang dilaksanakan unsur kepolisian untuk mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota.
- c) Kegiatan rutin kepolisian untuk tetap terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁸

B. Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara umum yaitu menunjukkan aktivitas perekonomian suatu Negara atau daerah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu. Menurut Sadono, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.¹⁹ Menurut Todaro dan Smith, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar.²⁰ Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara atau daerah untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan perekonomian suatu negara yang berkesinambungan setiap tahun dan menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan *output* nasional yang semakin lama semakin besar.

2. Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori Pertumbuhan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertumbuhan neo klasik. Teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik ini berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini mengacu pada kerangka analisis pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori ini adalah Robert Solow dan

¹⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, *Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, (Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2020), 14-27.

¹⁹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 9.

²⁰ M. Zahari, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi*, *Jurnal Of Economics And Business*, Vol. 1 No. 1 (September 2017), 6.

Trevor Swan. Menurut teori Solow-Swan ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal). Berdasarkan penelitiannya, Solow menyatakan bahwa peran dari kemajuan teknologi didalam pertumbuhan ekonomi sangat dominan. Temuan Solow menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang mencapai 2,75 persen per tahun pada periode 1909-1949, lebih dari setengahnya 1,5 persen merupakan kemajuan dari teknologi, sedangkan sisanya disebabkan oleh pertambahan jumlah penggunaan faktor produksi. Pandangan teori ini didasarkan pada anggapan yang mendasari analisis ekonomi klasik yaitu bahwa perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh dan tingkat pemanfaatan penuh dari faktor-faktor produksinya. Dengan kata lain, perekonomian akan terus berkembang dan semua itu tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi kapitalis, dan kemajuan teknologi.²¹

Teori pertumbuhan neo-klasik merupakan teori yang memusatkan inti teori kepada tiga faktor yaitu modal, kemajuan teknologi, dan tenaga kerja, teori ini meyakini bahwa apabila jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan maka akan meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, tanpa adanya kemajuan teknologi contohnya dibidang pembangunan infrastruktur, tenaga kerja tidak dapat memberikan hasil positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.²²

3. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Menurut para ahli teori-teori pertumbuhan ekonomi di atas, ada 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu :

a. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM sama halnya dengan pembangunan. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung pada sejauh mana sumber daya manusia selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembanguana dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah.

b. Faktor Sumber Daya Alam (SDA)

Sebagian besar negara berkembang bertumpu pada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam ynag tersedia. Sumber daya alam

²¹ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, edisi 5 (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), 87.

²² Rahardjo, Adisasmita. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

yang dimaksud di antaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

c. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak pada aspek efesiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

d. Faktor Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan di antaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan di antaranya sikap anarkis, egois, boros, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan sebagainya.

e. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola SDA dan meningkatkan kualitas Iptek. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.²³

4. Pertumbuhan Ekonomi dalam Prespektif Islam

Pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik. Pembahasan ini diantaranya berangkat dari firman Allah Swt. surat Hud ayat 61:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

Artinya:Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya....

Berdasarkan tafsir potongan ayat di atas, dia telah menciptakan kalian. Dialah yang mula-mula menciptakan kalian (dari bumi) yaitu

²³ Windhu Putra, *perekonomian indonesia penerepan beberapa teori ekonomi pembangunan di indonesia*, (Depok : Rajawali, 2018), 41-42.

dengan menciptakan Bapak moyang kalian (Adam), dari tanah dan menjadikan kalian pemakmurnya.²⁴

Menurut terminologi “pemakmuran bumi” mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir: *“Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian yang lebih besar dari pada orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran bumi. Barang siapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran bumi, negara tersebut akan hancur.”*

Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi. Perspektif Islam tidaklah sama dengan yang diantut oleh kapitalis, di mana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapasitas yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia.

Kemudian dilihat dari tujuan pokoknya, Islam tidak melihat pertumbuhan kekayaan sebagai sesuatu yang terpisah dengan cara distribusinya dan tuntutan realisasi keadilan sosial. Hal ini karena Islam terhubung dengan cara distribusinya, tuntutan untuk merealisasikan pertumbuhan kekayaan bagi anggota masyarakat dalam susunan kemudahan dan kasih sayang, dan berbagai persyaratan yang memungkinkan mereka dapat saling memberi dan menjalankan tugas dalam kehidupan ini. Di sisi lain, Islam mendorong agar produk masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok semua anggotanya dengan sejumlah komoditas yang memang diperlukan dalam tingkat berimbang bagi keseluruhan untuk mendapatkannya.²⁵

5. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi Islam

Menurut Moch. Zainudin, dalam perspektif ekonomi syariah ada tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu :

- a. *Investible resources* (sumber daya yang dapat diinvestasikan)

Investible resources adalah segala sumber daya yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian. Sumber daya tersebut antara lain sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya modal. sumber daya alam (SDA) pada dasarnya merupakan anugerah Allah dan telah disiapkan Allah untuk

²⁴ Tafsir Qur'an Surah Hud Ayat 61, diakses dalam <https://tafsirq.com/11-hud/ayat-61>, pada tanggal 29 Maret 2021.

²⁵ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pertumbuhan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2017), 124-125.

kepentingan manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifahNya di muka bumi, harus dapat dioptimalkan dengan baik dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan alam dengan baik.

b. Sumber daya manusia dan *entrepreneurship*

Basis ekonomi syariah adalah sektor riil, maka memiliki SDM *entrepreneur* yang mampu menggerakkan sektor riil adalah sebuah keniscayaan. Dibandingkan dengan Jepang dan Singapura yang memiliki jumlah *entrepreneur* hingga 10 persen dan 4 persen dari jumlah penduduk mereka, Indonesia hingga tahun 2012 menurut kementerian koperasi dan UMKM, baru memiliki *entrepreneur* sebanyak 0,18 persen dari jumlah penduduk. Padahal para *entrepreneur* inilah yang akan menjadi ujung tombak dalam membangun kemandirian ekonomi.

Kemandirian ekonomi ini dapat dicapai melalui pemenuhan dua hal, yaitu optimalisasi potensi lokal dan pengembangan budaya bisnis syariah. Pada optimalisasi potensi lokal, yang menjadi parameternya adalah sejauh mana suatu bangsa mampu menggali, mengkolaborasi dan mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki serta tidak mudah bergantung pada impor dan produk yang dihasilkan oleh bangsa lain. Ketergantungan yang tinggi pada pihak lain hanya akan membuat bangsa kita mudah dikendalikan oleh bangsa lain. Sebagai contoh, jika kita lebih memilih mengimpor buah dibandingkan dengan memproduksi buah secara lokal, dengan alasan lebih mudah dan lebih murah, maka kemandirian ekonomi kita akan terganggu.

c. Teknologi dan inovasi

Technological progress disadari merupakan faktor yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Teknologi akan melahirkan efisiensi, dan basis teknologi ini adalah inovasi. Karena itu, inovasi menjadi suatu kebutuhan yang perlu didesain secara serius oleh pemerintah. Islam adalah ajaran agama yang memerintahkan umatnya untuk senantiasa inovatif.²⁶

6. Konsep Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam

Munculnya konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi didasari baik dalam Al-Qur'an, sunnah, dan pemikiran ulama Islam terdahulu serta beberapa dari dasawarsa belakangan ini yang berhubungan dengan kondisi negara Muslim yang terbelakang dan sangat membutuhkan perhatian khusus baik bagi strateginya maupun perencanaan pembangunannya. Kemajuan materi pun juga harus menunjang

²⁶ Moch. Zainudin, *Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam*, Istithmar, Vol. 1, No. 2, Juli 2017, hlm. 126-127.

kematangan spiritual supaya dapat melihat pembangunan dalam aspek ekonomi sebagai pertumbuhan kematangan manusia. Beberapa tujuan yang lebih penting mestinya haruslah diprioritaskan seperti: stabilitas ekonomi, keadilan distribusi pertumbuhan seiring dengan ketersediaan tenaga kerja penuh, dan rasa peduli terhadap alam. Dalam Islam terdapat dasar filosofis yang berbeda terhadap pembangunan ekonomi pada umumnya, diantaranya:

- a. Tauhid *rububiyah*, yakni proses pernyataan dasar hukum Allah untuk merancang model pembangunan yang berasaskan nilai-nilai Islam.
- b. Keadilan, yakni meratanya pembangunan ekonomi.
- c. *Khalifah*, yaitu manusia-manusia merupakan wakil Allah di muka bumi yang diberi tugas untuk mengelola dan diamanahkan SDA untuk kemakmuran kemaslahatan umat manusia, bumi dan segala isinya.
- d. *Tazkiyah*, merupakan proses menyucikan manusia-manusia terkait dengan hubungannya dengan Allah, hubungan dengan sesamanya dan hubungannya dengan alam lingkungannya serta masyarakat dan juga negaranya.

Prinsip-prinsip pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam antara lain:

- a. Pembangunan ekonomi merupakan keseimbangan dari berbagai faktor-faktor sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dan aktivitas usaha bersifat multidimensional.
- b. Pada ajaran Islam, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki sifat yang komprehensif serta mengandung unsur-unsur moral, spiritual, dan material.
- c. Fokus utama pembangunan ialah lingkungan kultural manusia.
- d. Pembangunan lebih ditekankan pada pemanfaatan sumber daya secara maksimal terhadap apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia dan seluruh cakupan lingkungannya.

Konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Islam lebih menekankan pada pengembangan sumber daya manusianya sekaligus pemberdayaan alam secara lebih mendalam demi untuk meningkatkan harkat dan martabat seorang manusia. Ini tidak hanya dapat diraih dengan dapat terpenuhinya kebutuhan materiil saja, namun hal-hal ini juga bisa diwujudkan dari terpenuhinya segala kebutuhan dan persiapan dalam menyongsong kehidupan akhirat.²⁷

²⁷ Andi Zulfikar D, dkk, *Konsep Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Dalam Islam*, Jurnal iqtisaduna, Vol. 5 , No. 2, (2019), 268-269.

7. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi dalam Prespektif Islam

Menurut Al-Tariqi, Islam harus mempunyai karakteristik tersendiri agar tujuan pertumbuhan ekonominya bisa tercapai. Karakteristik tersebut adalah:

a. Komprehensif (*Al-Syumul*)

Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar persoalan materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporer, yaitu untuk menciptakan keadilan sosial. Pertumbuhan harus berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat.

b. Berimbang (*Tawazun*)

Pertumbuhan tidak hanya diorientasikan untuk menciptakan pertambahan produksi, namun ditujukan berlandaskan asas keadilan distribusi. Pertumbuhan juga memerlukan adanya keberimbangan usaha-usaha pertumbuhan. Oleh karena itu, Islam tidak menerima langkah kebijakan pertumbuhan perkotaan dengan mengabaikan pedesaan, industri yang mengabaikan pertanian atau dengan mengonsentrasikan percepatan pembangunan program tertentu dengan mengabaikan sarana umum dan prasarana pokok lainnya.

c. Realistis (*Waqi'iyah*)

Realistis adalah suatu pandangan terhadap permasalahan sesuai dengan kenyataan. Dalam teori-teori sosial secara umum, realistis merupakan persyaratan yang harus ada di dalamnya, karena teori yang utopis yang jauh dari kondisi riil akan sulit diterima oleh masyarakat. Islam yang merupakan agama yang berasal dari Allah tidak mungkin menetapkan aturan-aturan idealis yang jauh dari kehidupan manusia dan kemungkinan penerapannya. Realistis Islam adalah idealitas, dan idealitas islam adalah realitas.

d. Keadilan (*'Adl*)

Seperti dikemukakan diatas bahwa pertumbuhan harus disertai dengan adanya keadilan distributive. Dari realitas yang ada kita bisa melihat betapa kesenjangan antara yang kaya dan miskin di negeri ini telah sedemikian hebatnya. Realita disparitas ekonomi ini tidak saja terjadi di Indonsia dan negara-negara berkembang lainnya, tetapi juga negara-negara maju yang menjadi pendekar kapitalisme, seperti Amerika Serikat. Maka disinilah pentingnya pertumbuhan yang disertai dengan pemerataan yang adil.

e. Bertanggungjawab (*Mas'uliyah*)

Ketika Islam memberikan ruang kebebasan terhadap individu dalam bidang apapun dengan ekspresi yang mencerminkan penghormatan kepada manusia untuk menikmati kenikmatan duniawi, maka kebebasan ini tidak diberikan secara absolut tanpa batas. Kebebasan itu dibatasi oleh berbagai aturan yang menunjukkan adanya jaminan kebahagiaan seluruh anggota masyarakat. Karakteristik ini juga berkaitan dengan aspek lain dalam pertumbuhan, yaitu bahwa pertumbuhan harus *sustainable*. Pertumbuhan harus memperhatikan faktor ekologi dengan tidak mengeksploitasi seluruh sumber daya yang ada tanpa memperhatikan kelestariannya.

f. Mencukupi (*Kifayah*)

Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik tanggung jawab seperti yang telah diungkapkan, namun tanggung jawab itu haruslah mutlak dan mampu menakup realisasi kecukupan bagi umat manusia. Dalam hal ini para ahli fikih telah menetapkan dalam bidang pengalokasian harta dengan ukuran yang dapat mencukupi kebutuhan berupa pangan, sandang dan papan dalam batas yang seharusnya.

g. Berfokus pada manusia (*Ghayatuha al-Insan*)

Berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan obyek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia. Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya pada persoalan pembangunan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan.²⁸

C. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis Penelitian adalah pengujian kebenaran suatu data yang dikumpulkan melalui suatu penelitian. Hipotesis dapat juga diartikan sebagai jawaban sementara mengenai masalah dalam suatu penelitian yang bersifat dugaan karena masih harus dibuktikan mengenai kebenarannya, hipotesis dikatakan sementara karena belum didasarkan dengan fakta-fakta empiris yang di dapatkan melalui pengumpulan data hanya baru berdasarkan pada teori- teori yang relevan.²⁹

²⁸ Rizal Muttaqin, Ibid, 121-122.

²⁹ Ningrum, "Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (*Problem Solving*) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X", Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro, 5.1, 2017, 145–51.

Dengan adanya Hipotesis dalam suatu penelitian dapat memberikan gambaran sementara mengenai apa yang akan diteliti.

Pengaruh pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung saat pandemi covid-19. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iin Marleni, Sri Kasnelly dan Ahmad Luthfi dalam penelitian tersebut menunjukkan PSBB berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kuala Tungkal. Oleh sebab itu penerapan kebijakan PSBB untuk memperlambat penularan Covid-19 kurang tepat karena dapat mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi di Kuala Tungkal. Berdasarkan pada *literature* tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai jawaban sementara dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ho : Pemberlakuan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung saat pandemi covid-19.

Ha : Pemberlakuan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung saat pandemi covid-19.

Berdasarkan penjelasan hipotesis mengenai pengaruh pemberlakuan PSBB terhadap pertumbuhan ekonomi yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah:

Ho : Pemberlakuan PSBB tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung saat pandemi covid-19.



DAFTAR RUJUKAN

- Arsyad Lincoln, "*Ekonomi Pembangunan*", edisi 5, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.
- Barlian Eri, "*Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*", Padang: Sukabina Press, 2016.
- Bawono Anton, "*Ekonometrika Terapan*", Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, 2018.
- Faidz Mufidi Achmad, Nunung Nurwati R, "Pengaruh Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Tingkat Intensitas Mobilitas Penduduk Dan Mudik Lebara", Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran
- Ghazali Imam, "*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*", Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.
- Huda Nurul, dkk, "*Ekonomi Pembangunan Islam*", Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Priyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif*", Edisi 2016, Zifatama Publishing, 2016.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), "*Ekonomi Islam*", Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Putra Windhu, "perekonomian indonesia penerepan beberapa teori ekonomi pembangunan di indonesia", Depok: Rajawali, 2018.
- Rahardjo, Adisasmita, "Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Saregar Antomi, dkk, "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana", Bandar Lampung: 2020.
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*", Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sukirno Sadono, "*Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ariani Mewa, Setiyanto Adi, B. Purwantini Tri, "Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Distribusi dan Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga".
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (COVID-19)", Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020.
- Marleni, dkk, "Pengaruh PSBB Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kuala Tungkal Saat Covid-19", Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2 Edisi 2, (2019).
- Nasruddin Rindam, Haq Islamul, "Pembatasan Sosial Bersekala Besardan Masyarakat Berpenghasilan Rendah", Jurnal Sosial & Budaya Syar'i, Vol. 7 No. 7, (2020).
- Ningrum, "Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (Problem Solving) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X", Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro, 5.1, 2017.

- Nurrohman, Prawito Ponsen Sindu, "Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Indonesia: Studi Kasus Perkembangan Keuangan Komersial Syariah Dan Keuangan Sosial Syariah", (2020).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, "Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)", Jakarta: 2020.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)", Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2020.
- Supriatna Eman, "Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam", Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7 No. 6, (2020).
- Zahari M, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi", Jurnal *Of Economics And Business*, Vol. 1 No. 1 (2017).
- Zainudin Moch, "Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam", Istithmar, Vol. 1, No. 2, (2017).
- Zulfikar D Andi, dkk, "Konsep Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Dalam Islam", Jurnal iqtisaduna, Vol. 5 , No. 2.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), "Pengaruh", diakses dari <https://kbbi.web.id/Pengaruh>, tanggal 16 Januari 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), "Laku", diakses dari <https://kbbi.web.id/laku> tanggal 16 Januari 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), "Pandemi", diakses dari <https://kbbi.web.id/pandemi>, tanggal 16 Januari 2021.
- Mursalin Yasland, Manggala P Putra Yudha, "Wali Kota Bandar Lampung Evaluasi Pengetatan Jam Operasional Tempat Usaha", diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/qpc6gr284/wali-kota-bandar-lampung-evaluasi-pengetatan-jam-operasional>, Republika.Co.Id, Bandar Lampung.
- Pembengo Nancy, "WHO Tetapkan Covid-19 sebagai "Pandemi", dalam Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Gorontalo, 2020), <https://dinkes.gorontaloprov.go.id/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi/>, diunduh tanggal 08 November 2020.
- PSBB, diakses dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/05534481/daftar-18-daerah-yang-terapkan-psbb-dari-jakarta-hingga-makassar?page=all>, tanggal 16 Januari 2021.
- Saputra Adian, Umah Zakat Lampung Distribusi Kebahagiaan Di Tengah Pandemi Covid-19, diakses pada <http://www.jejamo.com/rumah-zakat-lampung-distribusi-kebahagiaan-di-tengah-pandemi-covid-19.html>, tanggal 29 Maret 2021.
- Tafsir Qur'an Surah Hud Ayat 61, diakses dalam <https://tafsirq.com/11-hud/ayat-61>, pada tanggal 29 Maret 2021.